

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Dipenghujung Jabatan, Anies Terus Digempur DPRD

JAKARTA (Poskota)

Berbagai serangan dilancarkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akibat hal itu, para anggota legislatif itu pun dinilai hobi menyebar hoax dan bahkan menarah ke fitnah.

Hal itu terkait tuduhan adanya jual beli jabatan di Pemrov DKI Jakarta yang dihembuskan anggota DPRD Gembong Warsono. Aksi itu diduga untuk membuat opini miring menjatuhkan Anies Baswedan, apalagi opini jahat itu tidak memiliki bukti kongkrit. "Itukan lempar isu dan akhirnya menjadi opini buruk dan negatif. Sama saja seperti black campaign," kata pengamat politik, Adib Miftahul, Kamis (25/8).

Pendiri Kajian Politik Nasional (KPN) ini menyindir orang-orang yang membuat isu sesat yang faktanya tidak ada. Padahal jika memang kasus itu nyata adanya, sebaiknya segera laporkan masalah itu ke penegak hukum agar

bisa segera di proses. "Kalau ada faktanya laporkan saja ke KPK," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Gue Jakarta Anti Hoak (G-JAH) Yan Rizal menyatakan, menjelang habisnya masa jabatan serangan kepada Anies makin kencang dan dahsyat. Rizal menduga, para pemain opini dan kaum nyinyir ada yang mengendalikan.

"Jika para DPRD tidak ada bukti maka sama dengan hoax dan fitnah dan model opini negatif inikan pola lama. Sejak dipimpin Anies jelas banyak perubahan di ibu kota dari jalur sepeda, fasilitas jalan kaki (trotoar), pembangunan JIS hingga balapan Formula E," ungkapnya.

Rizal melanjutkan, ada dugaan para pemain opini itu ingin melakukan Trial By The Press. Istilah ini adalah peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa dengan memberikan berita terus menerus sehingga menarik opini public untuk menghakimi tersangka atau

terdakwa yang dianggap bersalah padahal proses perkara belum selesai atau berkekuatan hukum tetap.

Minta Inspektorat Turun

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsano meminta Inspektorat segera turun tangan selidiki dugaan praktik jual beli jabatan. Pasalnya, inspektorat dinilai tidak bergerak cepat melacak adanya dugaan jual beli jabatan yang kini marak diperbincangkan. "Ya tindak lanjut itu kan begini, BKD itu kan tataran administrasi, ketika terjadi penyimpangan apakah itu ranahnya BKD, bukan, karena itu ranahnya inspektorat," ujarnya.

Seharusnya, kata Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta, ketika ada isu jual beli jabatan, Inspektorat DKI segera melakukan penelusuran terhadap

informasi yang disampaikan Komisi A. Apalagi saat rapat resmi pada Senin (15/8) Anggota Legislator DKI ungkap adanya jual beli jabatan di depan pihak inspektorat.

"Pada rapat kerja resmi dan inspektorat saat itu ada, walaupun di wakikan. Dalam rapat kerja itu kan ada juga inspektorat dan seharusnya inspektorat segera turun untuk melakukan investigasi terhadap laporan itu terhadap penyampaian dalam rapat kerja komisi itu," tuturnya.

Namun, karena tidak adanya gerakan dari Inspektorat DKI Jakarta, ia akhirnya mengusulkan agar Komisi A DPRD membentuk panitia khusus (Pansus). Usulan itu pun sudah mendapat lampu hijau dari koleganya di Komisi A. "Dari pada menunggu turunnya inspektorat lebih baik pansus dibentuk. Lebih komprehensif," tegas Gembong. (Aldi/Ifn)